

**DOKUMEN LAPORAN EVALUASI
PENGUKURAN KINERJA
TRIWULAN I TAHUN 2024
KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK**

=====

Jl Raya No 42 Purwareja Klampok Telepon (0286) 479002

<http://banjarnegarakab.go.id> Surat Elektronik kec_purwarejaklampok@banjarnegarakab.go.id
Kode Pos 53474

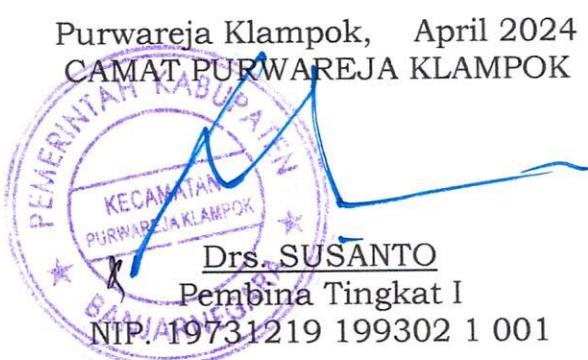
KATA PENGANTAR

Dengan memanjangkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sekalian, pelaksanaan penyusunan dan pembuatan Dokumen Laporan Evaluasi Pengukuran Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara, sebagai pelaksanaan dari Permenpan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Dokumen Laporan Evaluasi Pengukuran Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara merupakan evaluasi internal terhadap pengukuran kinerja setiap triwulan.

Dokumen Laporan Evaluasi Pengukuran Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara ini disusun untuk mengungkapkan secara obyektif tentang hasil kinerja berdasar target dan realisasi yang dicapai yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 - 2026.

Demikian Dokumen Laporan Evaluasi Pengukuran Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara disusun, dengan harapan dapat untuk menjadi tolok ukur kinerja dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.



**LAPORAN EVALUASI PENGUKURAN KINERJA
TRIWULAN I TAHUN 2024
KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK KABUPATEN BANJARNEGARA**

Pelaksanaan kegiatan pada Kecamatan Purwareja Klampok telah berlangsung selama 3 (tiga) bulan yaitu bulan Januari sampai dengan Maret 2024 yang berarti telah memasuki Triwulan I. Berdasarkan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2024 maka perlu dilakukan evaluasi guna diperoleh informasi mengenai pencapaian target beserta kendala dan solusi sehingga target tahunan yang telah ditetapkan dapat dicapai.

Capaian Kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Kecamatan Purwareja Klampok

Adapun capaian kinerja Triwulan I pada Kecamatan Purwareja Klampok dapat dijelaskan sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET DAN REALISASI 2024		
				TARGET TAHUNAN	TARGET S/D TW 1	REALISASI S/D TW 1
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk urusan kewilayahan	Nilai SAKIP		BB (71,20)	25%	25%
2	Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik	Survey Masyarakat	Kepuasan	84,35	25%	25%

untuk urusan kewilayahan	Daerah Kabupaten/Kota		
	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	25% 25%

Pengukuran dan pencapaian kinerja masing-masing sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 :	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk urusan kewilayahan
--------------------	--

Pemerintahan yang akuntabel diwujudkan dengan keseimbangan antara dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi. Dokumen yang telah disusun sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 berupa RKA, DPA, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan seperti : CALK (Akuntansi), BMD (Aset), Simbarsada (Aset) dan dokumen dalam rangka penilaian kinerja pada Kecamatan Purwareja Klampok. Dokumen dokumen tersebut digunakan dalam rangka mendukung akuntabilitas kinerja yang akan dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Banjarnegara.

Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Anggaran yang mendukung Pelaksanaan Kegiatan antara lain :

Kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran Nilai SAKIP dilakukan melalui kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Anggaran yang mendukung sasaran strategis ini di TW I sebesar Rp 23.787.350,- dengan didukung dari kegiatan antara lain, terdiri dari Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp. 0,- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar Rp. 14.660.000,- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 22.541.100,-.

Adapun realisasi anggaran program yang mendukung adalah :

A. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa yang terlaksana target 100% terealisasi 100%. Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan Koordinasi pemberdayaan masyarakat desa dengan indikator kinerja Prosentase Pemberdayaan masyarakat Desa yang terlaksana target

100% terealisasi 100%. Kegiatan ini didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

1. Sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan 1 (satu) indikator yaitu Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan target 10 lembaga kemasyarakatan terealisasi 10 lembaga kemasyarakatan. Anggaran yang mendukung untuk sub kegiatan tersebut sebesar Rp 0,- terealisasi Rp. 0,-

B. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana target 25% terealisasi 25%. Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dengan indikator kinerja Prosentase Penyelenggaraan Pemerintah sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang terlaksana target 25% terealisasi 25%. Kegiatan ini didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

1. Sub kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan 1 (satu) indikator yaitu Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan target 3 dokumen terealisasi 3 dokumen. Anggaran yang mendukung untuk sub kegiatan tersebut sebesar Rp. 3.665.000,- terealisasi Rp. 0,-

C. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana target 25% terealisasi 25%. Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan indikator kinerja Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana target 25% terealisasi 25%. Anggaran yang tersedia sebesar Rp.20.122.350,- terealisasi sebesar Rp. 17.831.600,-.

Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa didukung oleh 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu :

1. Sub kegiatan Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, dengan target 2 dokumen terealisasi 2 Dokumen. Tahun anggaran 2024 tersedia anggaran Rp. 0,- terealisasi sebesar Rp. 0,-.
2. Sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah dokumen yang di Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa dengan target 2 dokumen terealisasi 2 dokumen. Tahun anggaran 2024 tersedia anggaran Rp. 0,- terealisasi sebesar Rp. 0,- .
3. Sub kegiatan Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan aset Desa,dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah Dokumen yang di fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, dengan target 2 dokumen terealisasi 2 dokumen. Tahun anggaran 2024 tersedia anggaran yang sebelumnya Rp. 0,- terealisasi sebesar Rp. 0,-.
4. Sub kegiatan Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa,dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dengan target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen, pilkades dilaksanakan di Tahun 2024 1 desa yaitu desa Kaliwinasuh. Tahun anggaran 2024 tersedia anggaran yang sebelumnya Rp. 19.316.100,- terealisasi sebesar Rp. 17.831.600,-
5. Sub kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa, dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu: : Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa, dengan target 2 dokumen terealisasi 2 Dokumen.

Tahun anggaran 2024 tersedia anggaran Rp. 0,- terealisasi sebesar Rp. 0,-.

6. Sub kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan target 2 dokumen terealisasi 2 Dokumen. Tahun anggaran 2024 tersedia anggaran Rp 806.250,- terealisasi sebesar Rp. 0,-.
7. Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat desa, dengan 1 (satu) indicator keluaran, yaitu : Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dengan target 2 dokumen terealisasi 2 Dokumen. Tahun anggaran 2024 tersedia anggaran Rp 0,- terealisasi sebesar Rp. 0,-.
8. Sub kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya, dengan 1 (satu) indicator keluaran, yaitu : Jumlah dokumen Fasilitasi Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya, dengan target 2 dokumen terealisasi 2 Dokumen. Tahun anggaran 2024 tersedia anggaran Rp 0,- dan terealisasi Rp. 0,-.

Evaluasi terhadap Sasaran I terdapat indikator dan program yang harus disesuaikan yaitu :

- a. Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan hanya dilaksanakan untuk mendukung kegiatan musrenbangkec, sehingga di bulan Maret sudah harus terserap dan tercapai 100%.
- b. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, relatif tidak ada evaluasi karena merupakan kegiatan rutin.
- c. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa, untuk formulasi perhitungan kinerja dihitung lebih detail.

Sasaran 2**Meningkatnya efektivitas dan transparansi
layanan publik untuk urusan kewilayahan**

Sasaran meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik untuk urusan kewilayahan diukur dengan satu indikator kinerja yaitu Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan yang ditetapkan dengan prespektif pengguna layanan (*customer perspective*). Survey kepuasan masyarakat atau indeks kepuasan masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat pengguna jasa dalam meperoleh pelayanan dari aparatur pemerintah. Capaian nilai survey kepuasan masyarakat Tahun 2024 adalah sebesar 85,39 dari target yang ditetapkan sebesar 84,35 atau mencapai 101,23%. Indikator kinerja sesuai Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah survey kepuasan masyarakat di Kecamatan.

Unsur pelayanan yang digunakan untuk pengukuran indeks kepuasan masyarakat meliputi prosedur, persyaratan, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan dan penanganan pengaduan. Sasaran Strategis meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik untuk urusan kewilayahan dengan 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu Survey Kepuasan Masyarakat. Kegiatan ini baru terlaksana untuk survei semester I, diawali dengan pembagian form survei kepada pengguna jasa layanan untuk diisi sesuai keadaan saat pelayanan, dengan target masih 25% dengan realisasi 25%.

Program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran Survey Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan anggaran yang mendukung sasaran strategis ini di TW I sebesar Rp 524.386.000,- dengan didukung dari program antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 300.355.228,- dan

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar Rp. 1.463.850,-.

Adapun realisasi kinerja dan anggaran program yang mendukung adalah :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu penyelenggaraan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota target 25% terealisasi 25%. Program ini didukung oleh 6 (enam) dan 16 (enam belas) sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, yang memiliki 1 (satu) indikator yaitu Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dengan target 25% terealisasi 25%. Adapun sub kegiatan yang mendukung kegiatan tersebut adalah :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah target 8 dokumen terealisasi 8 dokumen. Tahun anggaran 2024 Triwulan I tersedia anggaran Rp 1.100.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.080.000,-
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan indikator Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD target 5 laporan terealisasi 5 laporan. Tahun anggaran 2024 Triwulan I tersedia anggaran Rp 1.100.000,- terealisasi sebesar Rp. 0,-
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang memiliki 1 (satu) indikator yaitu Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana dengan target 25% terealisasi 25%. Adapun sub kegiatan yang mendukung kegiatan tersebut adalah :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjang ASN dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN target 16 orang/bulan terealisasi 16 orang/bulan. Tahun anggaran 2024

Triwulan I tersedia anggaran Rp 300.355.228,- terealisasi sebesar Rp. 299.219.157,-.

- b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan Indikator Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD target 3 dokumen terealisasi 3 dokumen. Tahun anggaran 2024 Triwulan I tersedia anggaran Rp 4.625.400,- terealisasi sebesar Rp. 450.000,-.
 - c.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD target 3 laporan terealisasi 3 laporan. Tahun anggaran 2024 Triwulan I tersedia anggaran Rp 1.100.000,- terealisasi sebesar Rp. 0,-.
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang memiliki 1 (satu) indikator yaitu Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana dengan target 25% terealisasi 25%. Adapun sub kegiatan yang mendukung kegiatan tersebut adalah :
- a.Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan indikator sub kegiatan Sub Kegiatan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang Disediakan target 1 paket terealisasi 1 paket. Tahun anggaran 2024 Triwulan I tersedia anggaran Rp 4.999.500,- terealisasi sebesar Rp. 0,-.
 - b.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan target 3 paket terealisasi 3 paket. Tahun anggaran 2024 Triwulan I tersedia anggaran Rp 5.233.050,- terealisasi sebesar Rp. 1.431.200,-.
 - c.Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan target 13 paket terealisasi 13 paket. Tahun anggaran 2024 Triwulan I

tersedia anggaran Rp 31.848.075,- terealisasi sebesar Rp. 16.834.000,-.

4. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang memiliki 1 (satu) indikator yaitu Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana dengan target 25% terealisasi 25%. Adapun sub kegiatan yang mendukung kegiatan tersebut adalah :
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan target 3 laporan terealisasi 3 laporan. Tahun anggaran 2024 Triwulan I tersedia anggaran Rp 3.550.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.067.981,-
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan target 2 laporan terealisasi 2 laporan. Tahun anggaran 2024 tersedia anggaran Rp 20.581.733,- terealisasi sebesar Rp. 17.763.729,-.
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang memiliki 1 (satu) indikator yaitu Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daaerah yang terlaksana. Adapun sub kegiatan yang mendukung kegiatan tersebut adalah :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Dinas, Operasional Lapangan dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya target 10 unit terealisasi 10 unit. Tahun anggaran 2024 Triwulan I tersedia anggaran Rp 6.012.575,- terealisasi sebesar Rp. 3.791.600,-.
 - b. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan Indikator SubJumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi target 2 unit terealisasi 2

unit. Tahun anggaran 2024 Triwulan I tersedia anggaran Rp 0,- terealisasi sebesar Rp. 0,-.

c. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan Indikator Sub Kegiatan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi target 3 unit terealisasi 3 unit. Tahun anggaran 2024 Triwulan I tersedia anggaran Rp 5.998.375,- terealisasi sebesar Rp. 4.058.800,-.

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yang memiliki 1 (satu) indikator yaitu Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia tersedia dengan target 25% terealisasi 25%. Adapun sub kegiatan yang mendukung kegiatan tersebut adalah :

a. Pengadaan Mebel dengan indikator Jumlah Paket Mebel yang Disediakan target 3 paket terealisasi 3 paket. Tahun anggaran 2024 Triwulan I tersedia anggaran Rp 24.003.000,- terealisasi sebesar Rp. 0,-.

b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan indikator Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan target 1 unit terealisasi 1 unit. Tahun anggaran 2024 Triwulan I tersedia anggaran Rp 20.712.000,- terealisasi sebesar Rp. 0,-.

c. Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya dengan indikator Jumlah pengadaan gedung yang disediakan target 1 unit terealisasi 1 unit. Tahun anggaran 2024 Triwulan I tersedia anggaran Rp 39.039.100,- terealisasi sebesar Rp. 0,-.

d. Pengadaan Pendukung Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan indikator Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan target 3 unit terealisasi 3 unit. Tahun anggaran 2024 Triwulan I tersedia anggaran Rp 46.545.000,- terealisasi sebesar Rp. 0,-.

B. Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik target 25% terealisasi 25%. Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum, yang memiliki 1 (satu) indikator yaitu Persentase pelaksanaan Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasana Pelayanan Umum yang terlaksana dengan target 25% terealisasi 25%.

Adapun sub kegiatan yang mendukung kegiatan tersebut adalah :

a. Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum dengan indikator Jumlah Dokumen Koordinasi sinergitas dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen. Tahun anggaran 2024 tersedia anggaran Rp 0,- terealisasi sebesar Rp 0,-.

2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang di Limpahkan Kepada Camat, yang memiliki 1 (satu) indikator yaitu Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana dengan target 25% terealisasi 25%. Adapun sub kegiatan yang mendukung kegiatan tersebut adalah :

a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan dengan indikator Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan target 500 dokumen (rekomendasi, andon nikah, SKCK, Legalisasi, Dispensasi) terealisasi 1 laporan (KTP 846 pemohon 169,20%; KK 624 pemohon 124,8%). Tahun anggaran 2024 Triwulan I tersedia anggaran Rp 580.000,- terealisasi sebesar Rp 0,-.

b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Perijinan Non Usaha dengan indikator Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan target 500 dokumen (rekomendasi, andon nikah, SKCK, Legalisasi, Dispensasi) terealisasi 170 dokumen atau 34%

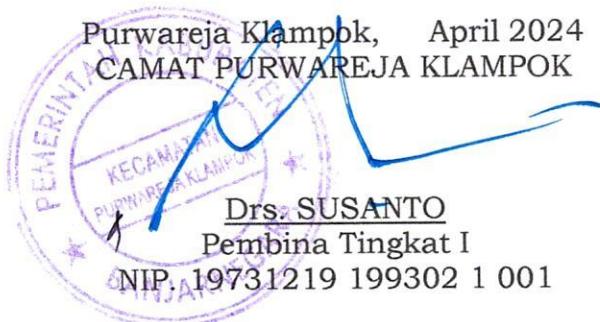
(rekomendasi, surat nikah, SKCK, Legalisasi, Dispensasi). Tahun anggaran 2024 Triwulan I tersedia anggaran Rp 0,- terealisasi sebesar Rp 0,-.

- c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dengan indikator Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Jumlah SPPT PBB yang tersalurkan) target 1 laporan (tersalurkannya SPPT ke wajib pajak) terealisasi 1 laporan (tersalurkannya SPPT ke wajib pajak 24.752 SPPT). Tahun anggaran 2024 Triwulan I tersedia anggaran Rp 4.605.000,- terealisasi sebesar Rp 0,-.

Evaluasi terhadap Sasaran II terdapat indikator dan program yang harus disesuaikan yaitu :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan untuk mendukung kegiatan operasional internal kantor.
- b. Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik sudah mengacu pada indikator terbaru sesuai Permendagri No 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Ketercapaian yang lebih dari 100%, untuk permohonan KK dan KTP merupakan indikator pelayanan yang baik, pelayanan di Kecamatan maupun Desa. Untuk Triwulan I SPPT baru didistribusikan dari Tim PBB Kabupaten, sehingga distribusi ke Desa selesai pada bulan Maret.

Demikian hasil evaluasi pengukuran kinerja yang telah dilaksanakan pada Triwulan I ini, semoga akan menjadi bahan koreksi untuk periode-periode berikutnya.



**DOKUMEN LAPORAN EVALUASI
PENGUKURAN KINERJA
TRIWULAN II TAHUN 2024
KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK**

=====

Jl Raya No 42 Purwareja Klampok Telepon (0286) 479002

<http://banjarnegarakab.go.id> Surat Elektronik kec_purwarejaklampok@banjarnegarakab.go.id
Kode Pos 53474

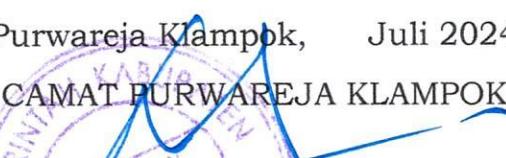
KATA PENGANTAR

Dengan memanjangkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sekalian, pelaksanaan penyusunan dan pembuatan Dokumen Laporan Evaluasi Pengukuran Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara, sebagai pelaksanaan dari Permenpan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Dokumen Laporan Evaluasi Pengukuran Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara merupakan evaluasi internal terhadap pengukuran kinerja setiap triwulanan.

Dokumen Laporan Evaluasi Pengukuran Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara ini disusun untuk mengungkapkan secara obyektif tentang hasil kinerja berdasar target dan realisasi yang dicapai yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 - 2026.

Demikian Dokumen Laporan Evaluasi Pengukuran Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara disusun, dengan harapan dapat untuk menjadi tolok ukur kinerja dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Purwareja Klampok, Juli 2024
CAMAT PURWAREJA KLAMPOK

Drs. SUSANTO
Pembina Tingkat I
NIP. 19731219 199302 1 001

**LAPORAN EVALUASI PENGUKURAN KINERJA
TRIWULAN II TAHUN 2024
KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK KABUPATEN BANJARNEGARA**

Pelaksanaan kegiatan pada Kecamatan Purwareja Klampok telah berlangsung selama 3 (tiga) bulan yaitu bulan April sampai dengan Juli 2024 yang berarti telah memasuki Triwulan II. Telah dilaksanakan penyelarasan renstra 2023-2026, cascading, pohon kinerja, rencana Aksi pencapaian kinerja Tahun 2024 dan dokumen-dokumen lainnya sesuai dengan berita acara yang telah ditanda tangani bersama. Sesuai dokumen penyelarasan untuk rencana aksi pencapaian kinerja Tahun 2024 maka perlu dilakukan evaluasi guna diperoleh informasi mengenai pencapaian target beserta kendala dan solusi sehingga target tahunan yang telah ditetapkan dapat dicapai.

Capaian Kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Kecamatan Purwareja Klampok

Adapun capaian kinerja Triwulan II pada Kecamatan Purwareja Klampok dapat dijelaskan sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET DAN REALISASI 2024		
				TARGET TAHUNAN	TARGET S/D TW II	REALISASI S/D TW II
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk urusan kewilayahan	Nilai Kecamatan SAKIP	BB (71,20)	50%	50%	

2	Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik untuk urusan kewilayahan	Survey Masyarakat Kecamatan	Kepuasan		85,50	50%	50%
		Persentase penyelenggaraan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota		100%	50%	50%	50%
		Persentase penyelenggaraan program pemerintahan dan pelayanan publik		100%	50%	50%	50%

Pengukuran dan pencapaian kinerja masing-masing sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 :	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk urusan kewilayahan
--------------------	--

Pemerintahan yang akuntabel diwujudkan dengan keseimbangan antara dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi. Dokumen yang telah disusun sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 berupa RKA, DPA, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan seperti : CALK (Akuntansi), BMD (Aset), Simbarsada (Aset) dan dokumen dalam rangka penilaian kinerja pada Kecamatan Purwareja Klampok. Dokumen dokumen tersebut digunakan dalam rangka mendukung akuntabilitas kinerja yang akan dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Banjarnegara.

Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Anggaran yang mendukung Pelaksanaan Kegiatan antara lain :

Kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran Nilai SAKIP dilakukan melalui kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Anggaran yang mendukung sasaran strategis ini di TW II sebesar Rp 31.537.600,- dengan didukung dari kegiatan antara lain, terdiri dari Program Pembinaan dan Pengawasan Desa Rp. 22.527.600,- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan Rp. 0,- dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Rp. 9.010.000,-.

Adapun realisasi anggaran program yang mendukung adalah :

A. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase Penyelenggaraan program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum target 50% terealisasi 50%. Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dengan indikator kinerja

Persentase Penyelenggaraan urusan Pemerintahan sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang terlaksana target 50% terealisasi 50%. Kegiatan ini didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

1. Sub kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan 1 (satu) indikator yaitu Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan target 6 dokumen terealisasi 6 dokumen. Anggaran yang mendukung untuk sub kegiatan tersebut sebesar Rp. 9.010.000,- terealisasi Rp. 8.525.000,-

B. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana target 50% terealisasi 50%. Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan indikator kinerja Persentase pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa target 50% terealisasi 50%. Anggaran yang tersedia sebesar Rp.22.527.600,- terealisasi sebesar Rp. 20.441.600,-.

Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa didukung oleh 8 (delapan) sub kegiatan, yaitu :

1. Sub kegiatan Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, dengan target 4 dokumen terealisasi 4 Dokumen. Tahun anggaran 2024 tersedia anggaran Rp. 0,- terealisasi sebesar Rp. 0,-.
2. Sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah dokumen yang di Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa dengan target 4 dokumen terealisasi 4 dokumen. Tahun anggaran 2024 tersedia anggaran Rp. 0,- terealisasi sebesar Rp. 0,- .
3. Sub kegiatan Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan aset Desa,dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu :

Jumlah Dokumen yang di fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, dengan target 4 dokumen terealisasi 4 dokumen. Tahun anggaran 2024 tersedia anggaran yang sebelumnya Rp. 0,- terealisasi sebesar Rp. 0,-.

4. Sub kegiatan Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa,dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dengan target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen, pilkades dilaksanakan di Tahun 2024 1 desa yaitu desa Kaliwinasuh. Tahun anggaran 2024 tersedia anggaran yang sebelumnya Rp. 19.316.100,- terealisasi sebesar Rp. 17.831.600,-
5. Sub kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa, dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu: : Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa, dengan target 4 dokumen terealisasi 4 Dokumen. Tahun anggaran 2024 tersedia anggaran Rp. 0,- terealisasi sebesar Rp. 0,-.
6. Sub kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan target 4 dokumen terealisasi 4 Dokumen. Tahun anggaran 2024 TW II tersedia anggaran Rp 3.211.500,- terealisasi sebesar Rp. 2.610.000,-.
7. Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat desa, dengan 1 (satu) indicator keluaran, yaitu : Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dengan target 4 dokumen terealisasi 4 Dokumen. Tahun anggaran 2024 tersedia anggaran Rp 0,- terealisasi sebesar Rp. 0,-.
8. Sub kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya, dengan 1 (satu) indicator keluaran, yaitu : Jumlah dokumen Fasilitasi Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya, dengan target 4

dokumen terealisasi 4 Dokumen. Tahun anggaran 2024 tersedia anggaran Rp 0,- dan terealisasi Rp. 0,-.

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase penyelenggaraan program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan target 100% terealisasi 100%. Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan masyarakat Desa dengan indikator kinerja Persentase pelaksanaan koordinasi Pemberdayaan masyarakat desa target 100% terealisasi 100%. Anggaran yang tersedia sebesar Rp.0,- terealisasi sebesar Rp. 0,-.

Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

1. Sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, dengan target 10 lembaga kemasyarakatan terealisasi 10 lembaga kemasyarakatan. Tahun anggaran 2024 tersedia anggaran Rp. 0,- terealisasi sebesar Rp. 0,-.

Evaluasi terhadap Sasaran I terdapat indikator dan program yang harus disesuaikan yaitu :

- a. Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan hanya dilaksanakan untuk mendukung kegiatan musrenbangkec, sehingga di bulan Maret sudah harus terserap dan tercapai 100%.
- b. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, relatif tidak ada evaluasi karena merupakan kegiatan rutin.
- c. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa, untuk formulasi perhitungan kinerja dihitung lebih detail.

Sasaran 2**Meningkatnya efektivitas dan transparansi
layanan publik untuk urusan kewilayahan**

Sasaran meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik untuk urusan kewilayahan diukur dengan satu indikator kinerja yaitu Survey Kepuasan Masyarakat

Kecamatan yang ditetapkan dengan prespektif pengguna layanan (*customer prospective*). Survey kepuasan masyarakat atau indeks kepuasan masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat pengguna jasa dalam meperoleh pelayanan dari aparatur pemerintah. Capaian nilai survey kepuasan masyarakat Tahun 2024 adalah sebesar 85,39 dari target yang ditetapkan sebesar 84,35 untuk target sebelum penyelarasan dokumen renstra, dan menjadi 85,50 targetnya setelah penyelarasan, persen ketercapaian adalah 101,23%. Indikator kinerja sesuai Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah survey kepuasan masyarakat di Kecamatan.

Unsur pelayanan yang digunakan untuk pengukuran indeks kepuasan masyarakat meliputi prosedur, persyaratan, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan dan penanganan pengaduan. Sasaran Strategis meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik untuk urusan kewilayahan dengan 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan. Kegiatan ini baru terlaksana untuk survei semester I, diawali dengan pembagian form survei kepada pengguna jasa layanan untuk diisi sesuai keadaan saat pelayanan, dengan target masih 50% dengan realisasi 50%.

Program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan dilakukan dengan anggaran yang mendukung sasaran strategis ini di TW II sebesar Rp 1.711.850.788,- dengan didukung dari kegiatan antara lain, terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota sebesar Rp. 1.704.564.121,- Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Rp. 9.016.000,-

Adapun realisasi anggaran program yang mendukung adalah :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota

Program ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase penyelenggaraan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota target 50% terealisasi 50%. Program ini didukung oleh 6 (enam) kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Persentase pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah target 50% terealisasi 50%. Kegiatan ini didukung oleh 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan 1 (satu) indikator yaitu Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN, target 16 ASN terealisasi 16 ASN. Anggaran yang mendukung untuk sub kegiatan tersebut sebesar Rp 1.267.422.910,- terealisasi Rp. 947.887.584,-
 - b. Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan 1 satu indikator yaitu Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, target 12 dokumen terealisasi 12 dokumen. Anggaran yang mendukung untuk sub kegiatan tersebut sebesar Rp 10.511.850,- terealisasi Rp. 9.218.750,-
 - c. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD dengan 1 satu indikator yaitu Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, target 12 laporan terealisasi

12 laporan. Anggaran yang mendukung untuk sub kegiatan tersebut sebesar Rp 937.500,- terealisasi Rp. 591.000,-

2. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun target 50% terealisasi 50%. Kegiatan ini didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

a. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan 1 (satu) indikator yaitu Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, target 8 dokumen (Renstra, IKU dan Cascading, Renja, RKA, DPA, Rencana Aksi, RKT, PK) terealisasi 8 dokumen (Renstra, IKU dan Cascading, Renja, RKA, DPA, Rencana Aksi, RKT, PK). Anggaran yang mendukung untuk sub kegiatan tersebut sebesar Rp 1.200.000,- terealisasi Rp. 480.000,-

b. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan 1 satu indikator yaitu Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, target 5 dokumen (LKjIP, LKPJ, Pengukuran Kinerja, Evaluasi Pengukuran Kinerja,) terealisasi 5 dokumen (LKjIP, LKPJ, Pengukuran Kinerja, Evaluasi Pengukuran Kinerja,). Anggaran yang mendukung untuk sub kegiatan tersebut sebesar Rp 1.200.000,- terealisasi Rp. 1.060.000,-

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator Persentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana, target 50% terealisasi 50%. Kegiatan ini didukung oleh 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

a. Sub kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan 1 (satu) indikator yaitu Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan. Anggaran yang mendukung untuk sub kegiatan tersebut sebesar Rp 4.999.500,- terealisasi Rp. 0,-

- b. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan 1 satu indikator yaitu Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan, target 3 dokumen terealisasi 3 dokumen. Anggaran yang mendukung untuk sub kegiatan tersebut sebesar Rp 20.712.000,- terealisasi Rp. 2.926.400,-
- c. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan 1 satu indikator yaitu Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan, target 8 paket terealisasi 8 paket. Anggaran yang mendukung untuk sub kegiatan tersebut sebesar Rp 72.726.875,- terealisasi Rp. 35.035000,-
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana, target 50% terealisasi 50%. Kegiatan ini didukung oleh 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :
- a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan 1 (satu) indikator yaitu Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan, target 3 laporan terealisasi 3 laporan. Anggaran yang mendukung untuk sub kegiatan tersebut sebesar Rp 44.746.358,- terealisasi Rp. 30.857.944,-.
 - b. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik dengan 1 satu indikator yaitu Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan, target 3 laporan terealisasi 3 laporan. Anggaran yang mendukung untuk sub kegiatan tersebut sebesar Rp 7.200.000,- terealisasi Rp. 4.426.623,-.
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daaerah dengan indikator Persentase pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daaerah yang terlaksana, target 50% terealisasi 50%. Kegiatan ini didukung oleh 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :
- a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- dengan 1 (satu) indikator yaitu Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya, target 9 unit terealisasi 9 unit. Anggaran yang mendukung untuk sub kegiatan tersebut sebesar Rp 21.150.300,- terealisasi Rp. 5.605.513,-
- b. Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan 1 satu indikator yaitu Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi, target 2 unit terealisasi 2 unit. Anggaran yang mendukung untuk sub kegiatan tersebut sebesar Rp 110.952.120,- terealisasi Rp. 750.000,-
- c. Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan 1 satu indikator yaitu Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi, target 2 paket terealisasi 2 paket. Anggaran yang mendukung untuk sub kegiatan tersebut sebesar Rp 10.955.608,- terealisasi Rp. 2.935.200,-
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator Persentase pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia, target 50% terealisasi 50%. Kegiatan ini didukung oleh 4 (empat) sub kegiatan yaitu :
- a. Sub kegiatan Pengadaan mebel dengan 1 (satu) indikator yaitu Jumlah pengadaan mebel yang disediakan, target 3 paket terealisasi 3 paket. Anggaran yang mendukung untuk sub kegiatan tersebut sebesar Rp 24.003.000,- terealisasi Rp. 0,-
 - b. Sub kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya dengan 1 satu indikator yaitu Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan, target 2 paket terealisasi 2 paket. Anggaran yang mendukung untuk sub kegiatan tersebut sebesar Rp 20.712.000,- terealisasi Rp. 0,-
 - c. Sub kegiatan Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya dengan 1 satu indikator yaitu Jumlah pengadaan gedung yang

disediakan, target 1 paket terealisasi 1 paket. Anggaran yang mendukung untuk sub kegiatan tersebut sebesar Rp 39.039.100,- terealisasi Rp. 33.655.300,-

d. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan 1 satu indikator yaitu Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di sediakan, target 3 unit terealisasi 3 unit. Anggaran yang mendukung untuk sub kegiatan tersebut sebesar Rp 46.545.000,- terealisasi Rp. 0,-

B. Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik target 50% terealisasi 50%. Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang di Limpahkan Kepada Camat, yang memiliki 1 (satu) indikator yaitu Persentase penyelenggaraan program pemerintahan dan pelayanan publik dengan target 50% terealisasi 50%. Adapun sub kegiatan yang mendukung kegiatan tersebut adalah :

- a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan dengan indikator Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan target 1 laporan 1 Laporan (KTP 750 pemohon, KK 750 pemohon) terealisasi 1 laporan (KTP 1.840 pemohon 245,33%; KK 624 pemohon 147,73%). Tahun anggaran 2024 Triwulan II tersedia anggaran Rp 1.951.667,- terealisasi sebesar Rp 1.500.000,-.
- b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Perijinan Non Usaha dengan indikator Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan target 750 dokumen (rekomendasi, andon nikah, SKCK, Legalisasi, Dispensasi) terealisasi 560 dokumen 74,67% (rekomendasi, andon nikah, SKCK, Legalisasi, Dispensasi). Tahun anggaran 2024 Triwulan II tersedia anggaran Rp 0,- terealisasi sebesar Rp 0,-.

c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dengan indikator Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Jumlah SPPT PBB yang tersalurkan) target 1 laporan (tersalurkannya SPPT ke wajib pajak) terealisasi 1 laporan (tersalurkannya SPPT ke wajib pajak 24.752 SPPT). Tahun anggaran 2024 Triwulan II tersedia anggaran Rp 5.335.000,- terealisasi sebesar Rp 925.000,-.

Evaluasi terhadap Sasaran II terdapat indikator dan program yang harus disesuaikan yaitu :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan untuk mendukung kegiatan operasional internal kantor.
- b. Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik sudah mengacu pada indikator terbaru sesuai Permendagri No 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Ketercapaian yang lebih dari 100%, untuk permohonan KK dan KTP merupakan indikator pelayanan yang baik, pelayanan di Kecamatan maupun Desa. Untuk Triwulan II SPPT baru didistribusikan dari Tim PBB Kabupaten, sehingga distribusi ke Desa selesai pada bulan Maret.

Demikian hasil evaluasi pengukuran kinerja yang telah dilaksanakan pada Triwulan I ini, semoga akan menjadi bahan koreksi untuk periode-periode berikutnya.

Purwareja Klampok, Juli 2024

CAMAT PURWAREJA KLAMPOK

Drs. SUSANTO

Pembina Tingkat I

NIP. 19731219 199302 1 001

**DOKUMEN LAPORAN EVALUASI
PENGUKURAN KINERJA
TRIWULAN III TAHUN 2024
KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK**

=====

Jl Raya No 42 Purwareja Klampok Telepon (0286) 479002

<http://banjarnegarakab.go.id> Surat Elektronik kec_purwarejaklampok@banjarnegarakab.go.id
Kode Pos 53474

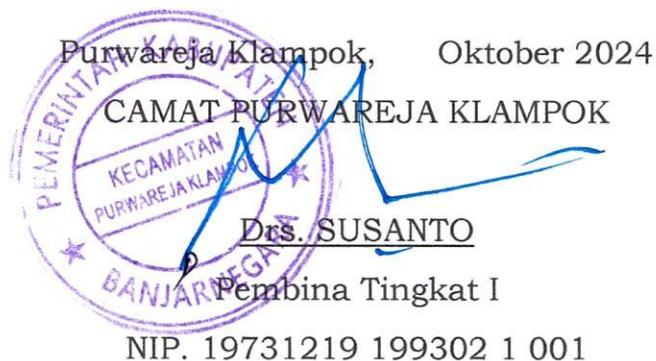
KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sekalian, pelaksanaan penyusunan dan pembuatan Dokumen Laporan Evaluasi Pengukuran Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara, sebagai pelaksanaan dari Permenpan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Dokumen Laporan Evaluasi Pengukuran Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara merupakan evaluasi internal terhadap pengukuran kinerja setiap triwulan.

Dokumen Laporan Evaluasi Pengukuran Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara ini disusun untuk mengungkapkan secara obyektif tentang hasil kinerja berdasar target dan realisasi yang dicapai yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 - 2026.

Demikian Dokumen Laporan Evaluasi Pengukuran Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara disusun, dengan harapan dapat untuk menjadi tolok ukur kinerja dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.



LAPORAN EVALUASI PENGUKURAN KINERJA
Triwulan III TAHUN 2024
KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK KABUPATEN BANJARNEGARA

Pelaksanaan kegiatan pada Kecamatan Purwareja Klampok telah berlangsung selama 3 (tiga) bulan yaitu bulan Juli sampai dengan September 2024 yang berarti telah memasuki Triwulan III. Telah dilaksanakan penyelarasan renstra 2023-2026, cascading, pohon kinerja, rencana Aksi pencapaian kinerja Tahun 2024 dan dokumen-dokumen lainnya sesuai dengan berita acara yang telah ditanda tangani bersama. Sesuai dokumen penyelarasan untuk rencana aksi pencapaian kinerja Tahun 2024 maka perlu dilakukan evaluasi guna diperoleh informasi mengenai pencapaian target beserta kendala dan solusi sehingga target tahunan yang telah ditetapkan dapat dicapai.

Capaian Kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Kecamatan Purwareja Klampok

Adapun capaian kinerja Triwulan III pada Kecamatan Purwareja Klampok dapat dijelaskan sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET DAN REALISASI 2024		
				TARGET TAHUNAN	TARGET S/D TW III	REALISASI S/D TW III
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk urusan kewilayahan	Nilai Kecamatan SAKIP	BB (71,20)	75%	75%	75%

2	Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik untuk urusan kewilayahan	Survey Masyarakat Kecamatan	Kepuasan		85,50	75%	75%
		Persentase penyelenggaraan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota		100%	75%	75%	75%
		Persentase penyelenggaraan program pemerintahan dan pelayanan publik		100%	75%	75%	75%

Pengukuran dan pencapaian kinerja masing-masing sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 :	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk urusan kewilayahan
--------------------	--

Pemerintahan yang akuntabel diwujudkan dengan keseimbangan antara dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi. Dokumen yang telah disusun sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 berupa RKA, DPA, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan seperti : CALK (Akuntansi), BMD (Aset), Simbarsada (Aset) dan dokumen dalam rangka penilaian kinerja pada Kecamatan Purwareja Klampok. Dokumen dokumen tersebut digunakan dalam rangka mendukung akuntabilitas kinerja yang akan dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Banjarnegara.

Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Anggaran yang mendukung Pelaksanaan Kegiatan antara lain :

Kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran Nilai SAKIP dilakukan melalui kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Anggaran yang mendukung sasaran strategis ini di TW IIII sebesar Rp 32.759.267,- dengan didukung dari kegiatan antara lain, terdiri dari Program Pembinaan dan Pengawasan Desa Rp. 22.527.600,- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan Rp. 0,- dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Rp. 10.231.667,-.

Adapun realisasi anggaran program yang mendukung adalah :

A. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase Penyelenggaraan program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum target 75% terealisasi 75%. Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dengan indikator kinerja

Persentase Penyelenggaraan urusan Pemerintahan sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang terlaksana target 75% terealisasi 75%. Kegiatan ini didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

1. Sub kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan 1 (satu) indikator yaitu Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan target 6 dokumen terealisasi 6 dokumen. Anggaran yang mendukung untuk sub kegiatan tersebut sebesar Rp. 10.231.667- terealisasi Rp. 8.525.000,-

B. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana target 75% terealisasi 75%. Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan indikator kinerja Persentase pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa target 75% terealisasi 75%. Anggaran yang tersedia sebesar Rp.22.527.600,- terealisasi sebesar Rp. 20.441.600,-.

Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa didukung oleh 8 (delapan) sub kegiatan, yaitu :

1. Sub kegiatan Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, dengan target 4 dokumen terealisasi 4 Dokumen. Tahun anggaran 2024 tersedia anggaran Rp. 0,- terealisasi sebesar Rp. 0,-.
2. Sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah dokumen yang di Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa dengan target 4 dokumen terealisasi 4 dokumen. Tahun anggaran 2024 tersedia anggaran Rp. 0,- terealisasi sebesar Rp. 0,- .
3. Sub kegiatan Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan aset Desa,dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu :

Jumlah Dokumen yang di fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, dengan target 4 dokumen terealisasi 4 dokumen. Tahun anggaran 2024 tersedia anggaran yang sebelumnya Rp. 0,- terealisasi sebesar Rp. 0,-.

4. Sub kegiatan Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa,dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dengan target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen, pilkades dilaksanakan di Tahun 2024 1 desa yaitu desa Kaliwinasuh. Tahun anggaran 2024 tersedia anggaran yang sebelumnya Rp. 19.316.100,- terealisasi sebesar Rp. 17.831.600,-
5. Sub kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa, dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu: : Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa, dengan target 4 dokumen terealisasi 4 Dokumen. Tahun anggaran 2024 tersedia anggaran Rp. 0,- terealisasi sebesar Rp. 0,-.
6. Sub kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan target 4 dokumen terealisasi 4 Dokumen. Tahun anggaran 2024 TW IIII tersedia anggaran Rp 3.211.500,- terealisasi sebesar Rp. 2.610.000,-.
7. Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat desa, dengan 1 (satu) indicator keluaran, yaitu : Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dengan target 4 dokumen terealisasi 4 Dokumen. Tahun anggaran 2024 tersedia anggaran Rp 0,- terealisasi sebesar Rp. 0,-.
8. Sub kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya, dengan 1 (satu) indicator keluaran, yaitu : Jumlah dokumen Fasilitasi Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya, dengan target 4

dokumen terealisasi 4 Dokumen. Tahun anggaran 2024 tersedia anggaran Rp 0,- dan terealisasi Rp. 0,-.

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase penyelenggaraan program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan target 100% terealisasi 100%. Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan masyarakat Desa dengan indikator kinerja Persentase pelaksanaan koordinasi Pemberdayaan masyarakat desa target 100% terealisasi 100%. Anggaran yang tersedia sebesar Rp.0,- terealisasi sebesar Rp. 0,-.

Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

1. Sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, dengan target 10 lembaga kemasyarakatan terealisasi 10 lembaga kemasyarakatan. Tahun anggaran 2024 tersedia anggaran Rp. 0,- terealisasi sebesar Rp. 0,-.

Evaluasi terhadap Sasaran I terdapat indikator dan program yang harus disesuaikan yaitu :

- a. Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan hanya dilaksanakan untuk mendukung kegiatan musrenbangkec, sehingga di bulan Maret sudah harus terserap dan tercapai 100%.
- b. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, relatif tidak ada evaluasi karena merupakan kegiatan rutin.
- c. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa, untuk formulasi perhitungan kinerja dihitung lebih detail.

Sasaran 2**Meningkatnya efektivitas dan transparansi
layanan publik untuk urusan kewilayahan**

Sasaran meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik untuk urusan kewilayahannya diukur dengan satu indikator kinerja yaitu Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan yang ditetapkan dengan prespektif pengguna layanan (*customer prospective*). Survey kepuasan masyarakat atau indeks kepuasan masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat pengguna jasa dalam mendapatkan pelayanan dari aparatur pemerintah. Capaian nilai survey kepuasan masyarakat Tahun 2024 adalah sebesar 85,39 dari target yang ditetapkan sebesar 84,35 untuk target sebelum penyelarasan dokumen renstra, dan menjadi 85,50 targetnya setelah penyelarasan, persen ketercapaian adalah 101,23%. Indikator kinerja sesuai Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah adalah survey kepuasan masyarakat di Kecamatan.

Unsur pelayanan yang digunakan untuk pengukuran indeks kepuasan masyarakat meliputi prosedur, persyaratan, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan dan penanganan pengaduan. Sasaran Strategis meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik untuk urusan kewilayahannya dengan 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan. Kegiatan ini baru terlaksana untuk survei semester I, diawali dengan pembagian form survei kepada pengguna jasa layanan untuk diisi sesuai keadaan saat pelayanan, dengan target masih 75% dengan realisasi 75%.

Program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan dilakukan dengan anggaran yang mendukung sasaran strategis ini di TW III sebesar Rp 1.723.895.882,- dengan didukung dari kegiatan antara lain, terdiri dari

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota sebesar Rp. 1.723.895.882,- Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Rp. 59.286.667,-

Adapun realisasi anggaran program yang mendukung adalah :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota
- Program ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase penyelenggaraan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota target 75% terealisasi 75%. Program ini didukung oleh 6 (enam) kegiatan yaitu :
1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Persentase pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah target 75% terealisasi 75%. Kegiatan ini didukung oleh 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan 1 (satu) indikator yaitu Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN, taget 16 ASN terealisasi 16 ASN. Anggaran yang mendukung untuk sub kegiatan tersebut sebesar Rp 1.267.422.910,- terealisasi Rp. 1.240.101.769,-
 - b. Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan 1 satu indikator yaitu Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, taget 12 dokumen terealisasi 12 dokumen. Anggaran yang mendukung untuk sub kegiatan tersebut sebesar Rp 10.511.850,- terealisasi Rp. 9.911.750,-
 - c. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD dengan 1 satu indikator yaitu Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, taget 12 laporan terealisasi 12 laporan. Anggaran yang mendukung untuk sub kegiatan tersebut sebesar Rp 937.500,- terealisasi Rp. 655.500,-

2. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun target 75% terealisasi 75%. Kegiatan ini didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- a. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan 1 (satu) indikator yaitu Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, target 8 dokumen (Renstra, IKU dan Cascading, Renja, RKA, DPA, Rencana Aksi, RKT, PK) terealisasi 8 dokumen (Renstra, IKU dan Cascading, Renja, RKA, DPA, Rencana Aksi, RKT, PK). Anggaran yang mendukung untuk sub kegiatan tersebut sebesar Rp 1.200.000,- terealisasi Rp. 530.000-
 - b. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan 1 satu indikator yaitu Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, target 5 dokumen (LKjIP, LKPJ, Pengukuran Kinerja, Evaluasi Pengukuran Kinerja,) terealisasi 5 dokumen (LKjIP, LKPJ, Pengukuran Kinerja, Evaluasi Pengukuran Kinerja,). Anggaran yang mendukung untuk sub kegiatan tersebut sebesar Rp 1.200.000,- terealisasi Rp. 1.411.000,-
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator Persentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terlaksana, target 75% terealisasi 75%. Kegiatan ini didukung oleh 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :
- a. Sub kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan 1 (satu) indikator yaitu Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan. Anggaran yang mendukung untuk sub kegiatan tersebut sebesar Rp 4.999.500,- terealisasi Rp. 1.999.500,-
 - b. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan 1 satu indikator yaitu Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan, target 3 dokumen terealisasi 3

- dokumen. Anggaran yang mendukung untuk sub kegiatan tersebut sebesar Rp 18.167.700,- terealisasi Rp. 5.922.500,-
- c. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan 1 satu indikator yaitu Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan, target 8 paket terealisasi 8 paket. Anggaran yang mendukung untuk sub kegiatan tersebut sebesar Rp 82.892.900,- terealisasi Rp. 35.035.000,-
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana, target 75% terealisasi 75%. Kegiatan ini didukung oleh 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :
- a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan 1 (satu) indikator yaitu Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan, target 3 laporan terealisasi 3 laporan. Anggaran yang mendukung untuk sub kegiatan tersebut sebesar Rp 21.150.300,- terealisasi Rp. 7.959.513,-
- b. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik dengan 1 satu indikator yaitu Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan, target 3 laporan terealisasi 3 laporan. Anggaran yang mendukung untuk sub kegiatan tersebut sebesar Rp 9.600.000,- terealisasi Rp. 6.633.160,-.
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daaerah dengan indikator Persentase pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daaerah yang terlaksana, target 75% terealisasi 75%. Kegiatan ini didukung oleh 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :
- a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan 1 (satu) indikator yaitu Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perzinannya, target 9 unit terealisasi 9 unit. Anggaran yang

- mendukung untuk sub kegiatan tersebut sebesar Rp 21.150.300,- terealisasi Rp. 7.959.513,-
- b. Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan 1 satu indikator yaitu Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi, target 2 unit terealisasi 2 unit. Anggaran yang mendukung untuk sub kegiatan tersebut sebesar Rp 110.952.120,- terealisasi Rp. 750.000,-
- c. Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan 1 satu indikator yaitu Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi, target 2 paket terealisasi 2 paket. Anggaran yang mendukung untuk sub kegiatan tersebut sebesar Rp 12.955.067,- terealisasi Rp. 9.887.900,-
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator Persentase pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia, target 75% terealisasi 75%. Kegiatan ini didukung oleh 4 (empat) sub kegiatan yaitu :
- a. Sub kegiatan Pengadaan mebel dengan 1 (satu) indikator yaitu Jumlah pengadaan mebel yang disediakan, target 3 paket terealisasi 3 paket. Anggaran yang mendukung untuk sub kegiatan tersebut sebesar Rp 24.003.000,- terealisasi Rp. 20.725.000,-
 - b. Sub kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya dengan 1 satu indikator yaitu Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan, target 2 paket terealisasi 2 paket. Anggaran yang mendukung untuk sub kegiatan tersebut sebesar Rp 20.712.000,- terealisasi Rp. 12.750.000,-
 - c. Sub kegiatan Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya dengan 1 satu indikator yaitu Jumlah pengadaan gedung yang disediakan, target 1 paket terealisasi 1 paket. Anggaran yang mendukung untuk sub kegiatan tersebut sebesar Rp 39.039.100,- terealisasi Rp. 33.655.300,-

d. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan 1 satu indikator yaitu Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di sediakan, target 3 unit terealisasi 3 unit. Anggaran yang mendukung untuk sub kegiatan tersebut sebesar Rp 46.545.000,- terealisasi Rp. 35.050.000,-

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik target 75% terealisasi 75%. Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang di Limpahkan Kepada Camat, yang memiliki 1 (satu) indikator yaitu Persentase penyelenggaraan program pemerintahan dan pelayanan publik dengan target 75% terealisasi 75%. Adapun sub kegiatan yang mendukung kegiatan tersebut adalah :
 - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan dengan indikator Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan target 1 laporan 1 Laporan (KTP 750 pemohon, KK 750 pemohon) terealisasi 1 laporan (KTP 1.840 pemohon 245,33%; KK 624 pemohon 147,73%). Tahun anggaran 2024 Triwulan III tersedia anggaran Rp 1.951.667,- terealisasi sebesar Rp 1.500.000,-.
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Perijinan Non Usaha dengan indikator Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan target 750 dokumen (rekomendasi, andon nikah, SKCK, Legalisasi, Dispensasi) terealisasi 560 dokumen 74,67% (rekomendasi, andon nikah, SKCK, Legalisasi, Dispensasi). Tahun anggaran 2024 Triwulan III tersedia anggaran Rp 0,- terealisasi sebesar Rp 0,-.
 - c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dengan indikator Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Jumlah SPPT PBB yang

tersalurkan) target 1 laporan (tersalurkannya SPPT ke wajib pajak) terealisasi 1 laporan (tersalurkannya SPPT ke wajib pajak 24.752 SPPT). Tahun anggaran 2024 Triwulan III tersedia anggaran Rp 5.335.000,- terealisasi sebesar Rp 925.000,-.

Evaluasi terhadap Sasaran II terdapat indikator dan program yang harus disesuaikan yaitu :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan untuk mendukung kegiatan operasional internal kantor.
- b. Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik sudah mengacu pada indikator terbaru sesuai Permendagri No 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Ketercapaian yang lebih dari 100%, untuk permohonan KK dan KTP merupakan indikator pelayanan yang baik, pelayanan di Kecamatan maupun Desa. Untuk Triwulan III SPPT baru didistribusikan dari Tim PBB Kabupaten, sehingga distribusi ke Desa selesai pada bulan Maret.

Demikian hasil evaluasi pengukuran kinerja yang telah dilaksanakan pada Triwulan III ini, semoga akan menjadi bahan koreksi untuk periode-periode berikutnya.

Purwareja Klampok, Oktober 2024



**DOKUMEN LAPORAN EVALUASI
PENGUKURAN KINERJA
TRIWULAN IV TAHUN 2024
KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK**

=====

Jl Raya No 42 Purwareja Klampok Telepon (0286) 479002

<http://banjarnegarakab.go.id> Surat Elektronik kec_purwarejaklampok@banjarnegarakab.go.id
Kode Pos 53474

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sekalian, pelaksanaan penyusunan dan pembuatan Dokumen Laporan Evaluasi Pengukuran Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara, sebagai pelaksanaan dari Permenpan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Dokumen Laporan Evaluasi Pengukuran Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara merupakan evaluasi internal terhadap pengukuran kinerja setiap triwulanan.

Dokumen Laporan Evaluasi Pengukuran Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara ini disusun untuk mengungkapkan secara obyektif tentang hasil kinerja berdasar target dan realisasi yang dicapai yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 - 2026.

Demikian Dokumen Laporan Evaluasi Pengukuran Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara disusun, dengan harapan dapat untuk menjadi tolok ukur kinerja dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.



LAPORAN EVALUASI PENGUKURAN KINERJA
Triwulan IV TAHUN 2024
KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK KABUPATEN BANJARNEGARA

Pelaksanaan kegiatan pada Kecamatan Purwareja Klampok telah berlangsung selama 3 (tiga) bulan yaitu bulan Oktober sampai dengan Desember 2024 yang berarti telah memasuki Triwulan IV Tahun 2024. Telah dilaksanakan penyelarasan renstra 2023-2026, cascading, pohon kinerja, rencana Aksi pencapaian kinerja Tahun 2024 dan dokumen-dokumen lainnya sesuai dengan berita acara yang telah ditanda tangani bersama. Sesuai dokumen penyelarasan untuk rencana aksi pencapaian kinerja Tahun 2024 maka perlu dilakukan evaluasi guna diperoleh informasi mengenai pencapaian target beserta kendala dan solusi sehingga target tahunan yang telah ditetapkan dapat dicapai.

Capaian Kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Kecamatan Purwareja Klampok

Adapun capaian kinerja Triwulan IV Tahun 2024 pada Kecamatan Purwareja Klampok dapat dijelaskan sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET DAN REALISASI 2024		
				TARGET TAHUNAN	TARGET S/D TW IV	REALISASI S/D TW IV
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk urusan kewilayahan	Nilai Kecamatan	SAKIP	BB (71,20)	BB (72,10) 100%	BB (72,10) 100%

2	Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik untuk urusan kewilayahan	Survey Masyarakat Kecamatan	Kepuasan	85,50
		Percentase penyelenggaraan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100%	100%

Pengukuran dan pencapaian kinerja masing-masing sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 :	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk urusan kewilayahan
--------------------	--

Pemerintahan yang akuntabel diwujudkan dengan keseimbangan antara dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi. Dokumen yang telah disusun sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 berupa RKA, DPA, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan seperti : CALK (Akuntansi), BMD (Aset), Simbarsada (Aset) dan dokumen dalam rangka penilaian kinerja pada Kecamatan Purwareja Klampok. Dokumen dokumen tersebut digunakan dalam rangka mendukung akuntabilitas kinerja yang akan dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Banjarnegara.

Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Anggaran yang mendukung Pelaksanaan Kegiatan antara lain :

Kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran Nilai SAKIP dilakukan melalui kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Anggaran yang mendukung sasaran strategis ini sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp 45.838.600,00 dengan didukung dari kegiatan antara lain, terdiri dari Program Pembinaan dan Pengawasan Desa Rp. 24.728.600,00 serta Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan Rp. 0,- dan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Rp. 21.110.000,00

Adapun realisasi anggaran program yang mendukung adalah :

A. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase Penyelenggaraan program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum target 100% terealisasi 100%. Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dengan indikator

kinerja Persentase Penyelenggaraan urusan Pemerintahan sesuai Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah yang terlaksana target 100% terealisasi 100%. Kegiatan ini didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

1. Sub kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan 1 (satu) indikator yaitu Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan target 12 dokumen terealisasi 12 dokumen. Anggaran yang mendukung untuk sub kegiatan tersebut sebesar Rp. 21.110.000,00 terealisasi Rp. 20.065.000,00

B. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana target 100% terealisasi 100%. Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan indikator kinerja Persentase pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa target 100% terealisasi 100%. Anggaran yang tersedia sebesar Rp.24.728.600,00 terealisasi sebesar Rp. 20.441.600,00

Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa didukung oleh 8 (delapan) sub kegiatan, yaitu :

1. Sub kegiatan Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, dengan target 8 dokumen terealisasi 8 Dokumen. Tahun anggaran 2024 tersedia anggaran Rp. 0,- terealisasi sebesar Rp. 0,-.
2. Sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah dokumen yang di Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa dengan target 8

dokumen terealisasi 8 dokumen. Tahun anggaran 2024 tersedia anggaran Rp. 0,- terealisasi sebesar Rp. 0,- .

3. Sub kegiatan Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan aset Desa,dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah Dokumen yang di fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, dengan target 8 dokumen terealisasi 8 dokumen. Tahun anggaran 2024 tersedia anggaran yang sebelumnya Rp. 0,- terealisasi sebesar Rp. 0,-.
4. Sub kegiatan Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa,dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah Dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dengan target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen, pilkades dilaksanakan di Tahun 2024 1 desa yaitu desa Kaliwinasuh. Tahun anggaran 2024 tersedia anggaran yang sebelumnya Rp. 19.316.100,- terealisasi sebesar Rp. 17.831.600,-
5. Sub kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa, dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu: : Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa, dengan target 8 dokumen terealisasi 8 Dokumen. Tahun anggaran 2024 tersedia anggaran Rp. 0,- terealisasi sebesar Rp. 0,-.
6. Sub kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan target 8 dokumen terealisasi 8 Dokumen. Tahun anggaran 2024 TW IV tersedia anggaran Rp 5.412.500,00 terealisasi sebesar Rp. 5.245.000,00
7. Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat desa, dengan 1 (satu) indicator keluaran, yaitu : Jumlah dokumen yang di Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat

Desa, dengan target 8 dokumen terealisasi 8 Dokumen. Tahun anggaran 2024 tersedia anggaran Rp 0,- terealisasi sebesar Rp. 0,-.

8. Sub kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya, dengan 1 (satu) indicator keluaran, yaitu : Jumlah dokumen Fasilitasi Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya, dengan target 8 dokumen terealisasi 8 Dokumen. Tahun anggaran 2024 tersedia anggaran Rp 0,- dan terealisasi Rp. 0,-.

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase penyelenggaraan program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan target 100% terealisasi 100%. Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan masyarakat Desa dengan indikator kinerja Persentase pelaksanaan koordinasi Pemberdayaan masyarakat desa target 100% terealisasi 100%. Anggaran yang tersedia sebesar Rp.0,- terealisasi sebesar Rp. 0,-.

Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan, yaitu Sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, dengan target 10 lembaga kemasyarakatan terealisasi 10 lembaga kemasyarakatan. Tahun anggaran 2024 tersedia anggaran Rp. 0,- terealisasi sebesar Rp. 0,-.

Evaluasi terhadap Sasaran I terdapat indikator dan program yang harus disesuaikan yaitu :

- a. Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan hanya dilaksanakan untuk mendukung kegiatan musrenbangkec, sehingga di bulan Maret sudah harus terserap dan tercapai 100% , Adapun kebutuhan anggaran ditopang dari sub kegiatan logistic kantor.

- b. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, relatif tidak ada evaluasi karena merupakan kegiatan rutin.
- c. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa, untuk formulasi perhitungan kinerja dihitung berdasarkan ketersediaan anggaran.

Sasaran 2

Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik untuk urusan kewilayahan

Sasaran meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik untuk urusan kewilayahannya diukur dengan satu indikator kinerja yaitu Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan yang ditetapkan dengan prespektif pengguna layanan (*customer prospective*). Survey kepuasan masyarakat atau indeks kepuasan masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat pengguna jasa dalam mendapatkan pelayanan dari aparatur pemerintah. Capaian nilai Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 sebesar **86,30** dari target yang ditetapkan sebesar 85,50 atau tercapai 100,94%. Capaian nilai tersebut berada pada interval nilai konversi **76,61 – 88,30** dapat disimpulkan bahwa mutu pelayanan di Kecamatan Purwareja Klampok adalah “**Baik**” sebagaimana tertuang dalam Permenpan RB RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggaran Pelayanan Publik

Unsur pelayanan yang digunakan untuk pengukuran indeks kepuasan masyarakat meliputi prosedur, persyaratan, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan dan penanganan pengaduan. Sasaran Strategis meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik untuk urusan kewilayahannya dengan 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan. Kegiatan ini baru terlaksana untuk survei semester I, diawali dengan pembagian form survei kepada pengguna jasa

layanan untuk diisi sesuai keadaan saat pelayanan, dengan target masih 100% dengan realisasi 100%.

Program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan dilakukan dengan anggaran yang mendukung sasaran strategis ini sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 sebesar Rp 2.322.917.223,00 didukung dari kegiatan antara lain, terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota sebesar Rp. 2.219.102.223,00 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Rp. 103.815.000,00

Adapun realisasi anggaran program yang mendukung sasaran ke dua adalah :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota

Program ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase penyelenggaraan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota target 100% terealisasi 100%. Program ini didukung oleh 6 (enam) kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Persentase pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah target 100% terealisasi 100%. Kegiatan ini didukung oleh 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan 1 (satu) indikator yaitu Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN, taget 16 ASN terealisasi 9 ASN. Anggaran yang mendukung untuk sub kegiatan tersebut sebesar Rp 1.678.571.471,00 terealisasi Rp. 1.611.891.182,00 atau 96,03%
 - b. Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan 1 satu indikator yaitu Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, taget 12 dokumen terealisasi 12 dokumen. Anggaran yang mendukung untuk sub kegiatan tersebut sebesar Rp 22.480.000,00 terealisasi Rp. 22.164.000,00 atau 98,59%.
 - c. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD dengan 1 satu indikator yaitu

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, target 12 laporan terealisasi 12 laporan. Anggaran yang mendukung untuk sub kegiatan tersebut sebesar Rp 1.500.000,00 terealisasi Rp. 655.500,00 atau 43,70%

2. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun target 100% terealisasi 100%. Kegiatan ini didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan 1 (satu) indikator yaitu Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, target 8 dokumen (Renstra, IKU dan Cascading, Renja, RKA, DPA, Rencana Aksi, RKT, PK) terealisasi 8 dokumen (Renstra, IKU dan Cascading, Renja, RKA, DPA, Rencana Aksi, RKT, PK). Anggaran yang mendukung untuk sub kegiatan tersebut sebesar Rp 1.500.000,00 terealisasi Rp. 630.000,00 atau 42,00%
 - b. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan 1 satu indikator yaitu Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, target 5 dokumen (LKjIP, LKPJ, Pengukuran Kinerja, Evaluasi Pengukuran Kinerja) terealisasi 5 dokumen laporan (LKjIP, LKPJ, Pengukuran Kinerja, Evaluasi Pengukuran Kinerja, dan RKT (Rencana Kerja Tahunan). Anggaran yang mendukung untuk sub kegiatan tersebut sebesar Rp 1.500.000,00 terealisasi Rp. 1.411.000,00 atau 94,07%
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator Persentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang

terlaksana, target 100% terealisasi 100%. Kegiatan ini didukung oleh 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

- a. Sub kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan 1 (satu) indikator yaitu Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan. Anggaran yang mendukung untuk sub kegiatan tersebut sebesar Rp 1.999.500,00 terealisasi Rp. 1.999.500,00 atau 100%
 - b. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan 1 satu indikator yaitu Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan, target 3 dokumen terealisasi 3 dokumen. Anggaran yang mendukung untuk sub kegiatan tersebut sebesar Rp 22.030.400,00 terealisasi Rp. 21.466.800,00 atau 97,44%
 - c. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan 1 satu indikator yaitu Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan, target 5 paket terealisasi 5 paket. Anggaran yang mendukung untuk sub kegiatan tersebut sebesar Rp 136.817.300,00 terealisasi Rp. 118.654.750,00 atau 86,72%
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana, target 100% terealisasi 100%. Kegiatan ini didukung oleh 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :
- a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan 1 (satu) indikator yaitu Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan, target 4 laporan terealisasi 4 laporan. Anggaran yang mendukung untuk sub kegiatan tersebut sebesar Rp 14.200.000,00 terealisasi Rp. 12.972.781,00 atau 91,36%
 - b. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik dengan 1 satu indikator yaitu Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan, target 3 laporan terealisasi 3 laporan. Anggaran yang mendukung

untuk sub kegiatan tersebut sebesar Rp 68.465.932,00 terealisasi Rp. 63.207.544,00 atau 92,32%

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daaerah dengan indikator Persentase pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daaerah yang terlaksana, target 100% terealisasi 100%. Kegiatan ini didukung oleh 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :
 - a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan 1 (satu) indikator yaitu Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya, target 12 unit terealisasi 12 unit. Anggaran yang mendukung untuk sub kegiatan tersebut sebesar Rp 23.985.900,00 terealisasi Rp. 20.505.113,00 atau 85,49%
 - b. Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan 1 satu indikator yaitu Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi, target 3 unit terealisasi 3 unit. Anggaran yang mendukung untuk sub kegiatan tersebut sebesar Rp 113.612.120,00 terealisasi Rp. 110.745.100,00 atau 97,48%
 - c. Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan 1 satu indikator yaitu Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi, target 2 paket terealisasi 2 paket. Anggaran yang mendukung untuk sub kegiatan tersebut sebesar Rp 23.993.500,00 terealisasi Rp. 22.721.400,00 atau 94,70%
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator Persentase pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia, target 100% terealisasi 100%. Kegiatan ini didukung oleh 4 (empat) sub kegiatan yaitu :

- a. Sub kegiatan Pengadaan mebel dengan 1 (satu) indikator yaitu Jumlah pengadaan mebel yang disediakan, target 4 paket terealisasi 4 paket. Anggaran yang mendukung untuk sub kegiatan tersebut sebesar Rp 24.003.000,- terealisasi Rp. 23.525.000,00 atau 98,01%
- b. Sub kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya dengan 1 satu indikator yaitu Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan, target 2 paket terealisasi 2 paket. Anggaran yang mendukung untuk sub kegiatan tersebut sebesar Rp 18.712.000,00 terealisasi Rp. 18.250.000,00 atau 97,53%
- c. Sub kegiatan Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya dengan 1 satu indikator yaitu Jumlah pengadaan gedung yang disediakan, target 1 paket terealisasi 1 paket. Anggaran yang mendukung untuk sub kegiatan tersebut sebesar Rp 39.039.100,- terealisasi Rp. 33.655.300,-
- d. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan 1 satu indikator yaitu Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di sediakan, target 3 unit terealisasi 3 unit. Anggaran yang mendukung untuk sub kegiatan tersebut sebesar Rp 50.672.000,00 terealisasi Rp. 49.150.000,00 atau 97,00%

B. Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik target 100% terealisasi 100%. Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang di Limpahkan Kepada Camat, yang memiliki 1 (satu) indikator yaitu Persentase penyelenggaraan program pemerintahan dan pelayanan publik dengan target 100% terealisasi 100%. Adapun sub kegiatan yang mendukung kegiatan tersebut adalah :

- a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan dengan indikator Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan target 1 laporan 1 Laporan (KTP 1.000 pemohon, KK 1.000 pemohon) terealisasi 1 laporan (KTP 1.639 pemohon 163,90%; KK 1.899 pemohon 189,90%). Tahun anggaran 2024 Triwulan IV tersedia anggaran Rp 3.740.000,00 terealisasi sebesar Rp 3.710.000,00 atau 98,20%
- b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Perijinan Non Usaha dengan indikator Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan target 1.500 dokumen terealisasi 1.793 dokumen pemohon terdiri dari Pembelian BBM solar UMKM 119 pemohon, SKTM 78 pemohon, AK 1 88 pemohon, Surat Kehilangan 74 pemohon, Rekomendasi Pernikahan Dini 55 pemohon, Dispensasi Nikah 130 pemohon, Ijin Keramaian 50 pemohon, Penggunaan Aula 24 pemohon dan Pindah domisili 636 pemohon. Sub kegiatan tersebut tersedia anggaran Rp 0,- terealisasi sebesar Rp 0,-.
- c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dengan indikator Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Jumlah SPPT PBB yang tersalurkan) target 1 laporan (tersalurkannya SPPT ke wajib pajak) terealisasi 1 laporan (tersalurkannya SPPT ke wajib pajak target 24.752 SPPT realisasi 24984 SPPT). Sampai dengan Triwulan IV tersedia anggaran Rp 100.075.000,00 terealisasi sebesar Rp 100.045.000,00 atau 99,97%.

Evaluasi terhadap Sasaran II terdapat indikator dan program yang harus disesuaikan yaitu :

- a. Adanya kegiatan yang menunjang capaian kinerja namun tidak terdapat alokasi anggaran, realisasi kinerja tetap tercapai karena kinerja tersebut merupakan kewenangna yang melekat pada tugas pokok.

- b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan untuk mendukung kegiatan operasional internal kantor.
- c. Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik sudah mengacu pada indikator terbaru sesuai Permendagri No 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Ketercapaian yang lebih dari 100%, untuk permohonan KK dan KTP merupakan indikator pelayanan yang baik, pelayanan di Kecamatan maupun Desa. Demikian hasil evaluasi pengukuran kinerja yang telah dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2024 ini, semoga akan menjadi bahan koreksi untuk periode-periode berikutnya.

